



**Judul** : Kelanjutan RUU Sisdiknas Tunggu DPR  
**Tanggal** : Sabtu, 27 Agustus 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 5

## PENDIDIKAN

# Kelanjutan RUU Sisdiknas Tunggu DPR

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dari pemerintah sudah siap sebagai draf usulan. Pemerintah masih menunggu persetujuan DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Perubahan 2022.

"RUU Sisdiknas sudah siap sebagai draf usulan. Begitu DPR menyetujui RUU Sisdiknas masuk daftar prioritas, pemerintah akan mengirimkan draf usulan RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya kepada DPR," kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Menurut Anindito, RUU Sisdiknas sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah sejak 2020. Untuk bisa dibahas, RUU harus masuk daftar Prolegnas Prioritas di tahun berjalan.

Anindito mengatakan, pemerintah masih menunggu persetujuan DPR untuk memasukkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022. Nanti DPR memutuskan apakah RUU tersebut dibahas di Badan Legislasi atau di Komisi X DPR

(salah satunya membidangi pendidikan).

### Partisipasi publik

Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia Doni Koesoema menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak peduli terhadap kritik dan masukan masyarakat agar menunda revisi UU Sisdiknas dan fokus pada pemulihan belajar pascapandemi. "Perancangan RUU Sisdiknas ini tidak transparan dan minim partisipasi publik," kata Doni.

Dari informasi yang dihimpun, pada Senin (22/8), sepuluh organisasi guru diundang untuk diskusi kelompok terpumpun (FGD) tentang RUU Sisdiknas di Ruang Sidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Namun, peserta tidak diberikan draf RUU dan naskah akademik sebelum FGD.

Saat itu, Kemendikbudristek hanya memberikan presentasi dan peserta diperbolehkan memotret paparan. Alasan Kemendikbudristek, penyusunan masih berubah-ubah sehingga dokumen belum bisa diberikan kepada publik. Saat itu, penyusunan masih dalam tahap perencanaan.

Kini, Kemendikbudristek sudah meluncurkan laman resmi yang bisa diakses publik di alamat [sisdiknas.kemdikbud.go.id](http://sisdiknas.kemdikbud.go.id). Laman ini untuk memberi informasi terkini dan kepercayaan tentang per-

kembangan pembentukan RUU Sisdiknas.

Kemendikbudristek mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan RUU Sisdiknas dengan mempelajari naskah akademik RUU Sisdiknas dan memberi masukan. Di laman sudah diunggah RUU Sisdiknas versi Agustus 2022.

RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut tiga undang-undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sesuai amanat perundang-undangan, pemerintah terbuka dalam menerima saran dan masukan dari publik. Selama tahap perencanaan, pemerintah telah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberi masukan terhadap draf versi awal RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya. Draft terbaru juga telah dikirimkan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk mendapat masukan lebih lanjut.

"Masukan dari publik tersebut merupakan bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai amanat undang-undang dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahap penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang," kata Anindito. (ELN)